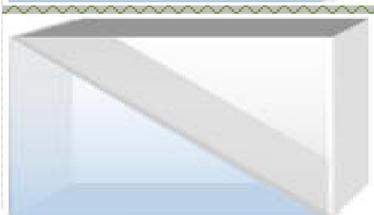




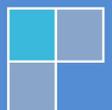
RENCANA STRATEGIS

DINAS PERIKANAN KOTA BATAM

TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN 2021





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan.

Renstra Perangkat Daerah (PD) dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Selanjutnya Renstra Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021 – 2026 akan dipergunakan sebagai acuan setiap unit kerja lingkup Dinas Perikanan Kota Batam untuk perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Batam, Desember 2021

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KOTA BATAM**



Ir. Husnaini

NIP. 19620819 199203 2 005



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN	
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Batam	II-1
2.1.1. Kepala Dinas	II-1
2.1.2. Sekretariat	II-2
2.1.3. Bidang Perikanan Tangkap	II-4
2.1.4. Bidang Perikanan Budidaya	II-4
2.1.5. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan ..	II-5
2.1.6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.....	II-6
2.1.7. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Terkait Penyederhaan Birokrasi	II-4
2.2. Sumber Daya Perikanan.....	II-10
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan.....	II-17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan.....	II-24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih	III-2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DKP Provinsi	III-5
3.3.1 Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	III-5
3.3.2 Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	III-13
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-16
3.4.1. Pola Ruang Wilayah	III-16
3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-21
3.5. Penentuan isu-Isu Strategis Dinas Perikanan Kota Batam	III-22
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1



BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN PILIHAN VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi Pegawai Menurut Usia Per Unit Kerja Tahun 2021	II-10
Tabel 2.2	Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan Per Unit Kerja Tahun 2021.....	II-11
Tabel 2.3	Klasifikasi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Per Unit Kerja Tahun 2021..	II-12
Tabel 2.4	Klasifikasi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Per Unit Kerja Tahun 2021..	II-12
Tabel 2.5	Kondisi Eksisting dan Jumlah Kebutuhan terhadap Jabatan di Lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021	II-13
Tabel 2.6	Sarana Dinas Perikanan Kota Batam	II-16
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2016-2020	II-19
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2016 -2020.....	II-22
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran sPembangunan	III-1
Tabel 3.2	Kaitan Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Peran Dinas Perikanan	III-4
Tabel 3.3	Keselarasn Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan KKP dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Batam	III-11
Tabel 3.4	Keselarasn Tujuan dan Sasaran DKP Provinsi Kepulauan Riau dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Batam	III-15
Tabel 3.5	Kawasan Peruntukan RTRW Kota Batam 2021-2041 terkait Dinas Perikanan.....	III-17
Tabel 3.6	Program Utama RTRW Kota Batam 2021-2041 terkait Dinas Perikanan	III-20
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV-6
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perikanan Kota Batam	V-4
Tabel 5.2	Keterkaitan Strategi RPJMD 2021-2026 dengan Strategi Renstra Dinas Perikanan 2021-2026	V-6
Tabel 5.3	Keterkaitan Program Dinas Perikanan dengan Program Prioritas Janji Walikota dan Wakil Walikota.....	V-6
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2021-2026	VI-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Perikanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Batam	I-4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Batam	II-8
Gambar 2.2	Rancangan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Batam Mengacu PERMENPAN-RB No. 25 Tahun 2021	II-9
Gambar 3.1	Peta Strategi KKP Tahun 2020-2024	III-8
Gambar 4.1	Analisa Pohon Masalah	IV-3
Gambar 4.2	Analisa Pohon Tujuan	IV-4
Gambar 4.3	Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)	IV-5
Gambar 5.1	Diagram Analisis SWOT Perumusan Strategi Jangka Menengah	V-3



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya untuk mengoptimalkan sumber daya perikanan perlu direncanakan dengan baik agar dapat tetap menjaga keberlangsungan sumber daya alamnya. Hal ini dilakukan dengan menyusun dokumen perencanaan yang disebut Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam penyusunannya Renstra Perangkat Daerah (PD) berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dengan demikian selanjutnya, kedudukan Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun.

Renstra mempunyai arti penting bagi Dinas Perikanan Kota Batam yang merencanakan pembangunan sektor perikanan di Kota Batam selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Batam sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Fungsi Renstra Dinas Perikanan secara khusus meliputi beberapa hal ini dibawah ini yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perikanan; dan



e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun proses penyusunan Renstra melalui lima tahapan penting yang harus dilakukan oleh stakeholders penyusunan Renstra. Pertama tahap persiapan penyusunan Renstra yang dimulai dengan pembentukan tim penyusun Renstra oleh kepala OPD sesuai mandat yang diberikan oleh kepala daerah. Kedua penyusunan dokumen rancangan awal (ranwal) renstra yang mengacu pada rancangan awal RPJMD Kepala Daerah terpilih sebagai draft awal untuk bahan dasar yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut. Ketiga penyusunan rancangan Renstra dengan mengacu kepada rancangan RPJMD Kepala Daerah dan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah. Keempat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan. Kelima penyusunan rancangan akhir (Ranhir) Renstra yang mengacu kepada ranhir RPJMD dengan melibatkan berbagai stakeholders dari unsur pemerintah dalam memberikan kontribusi terhadap renstra. Keenam penetapan renstra sebagai dokumen resmi melalui peraturan Kepala Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Renstra Dinas Perikanan Kota Batam disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban. Penyusunan Renstra juga tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kota Batam sehingga dapat tercipta sinergitas dan keselarasan program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Perangkat Daerah.

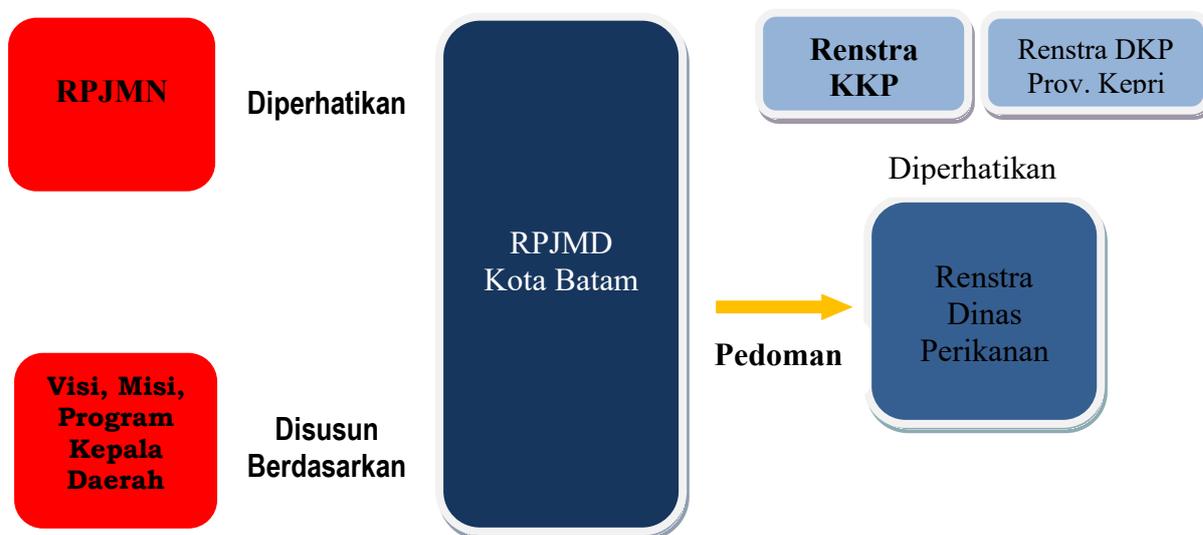
Keterkaitan Renstra ini dengan RPJMD dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan dalam rangka mengoptimalkan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh RPJMD Kepala Daerah dalam sektor perikanan . Peran



dan fungsi RPJMD sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjadi acuan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahunan bagi seluruh stakeholder termasuk swasta dan masyarakat. Berdasarkan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Batam terkait dengan pencapaian misi pertama dari RPJMD Kota Batam yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Kegiatan Perekonomian Berbasis Keunikan dan Keunggulan Wilayah dengan tujuan Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif. Indikator tujuan RPJMD dari misi pertama ini adalah Gini Rasio. Dinas perikanan mendukung sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan dengan indicator sasaran jumlah produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan.

Selain itu juga Renstra Dinas Perikanan Kota Batam mengacu pada arah kebijakan Nasional pembangunan perikanan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Perikanan Kota Batam juga menjadi pedoman penyusunan Renja tahunan Dinas Perikanan Kota Batam. Dengan demikian diharapkan terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan pelaksanaannya. Kemudian dokumen Renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja beserta pendanaanya sehingga akuntabilitas pelaksanaan beserta pengorganisasinya dapat dievaluasi selama periode 2021 - 2026.



Gambar 1.1 Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan

1.2 Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum yang melandasi pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;



15. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Batam No. 03 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041;
21. Peraturan Daerah Kota Batam No. 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pokok Dinas Perikanan Kota Batam.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah memberikan keselarasan arah pembangunan urusan perikanan Kota Batam dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perikanan Kota Batam dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan
2. Teridentifikasinya program/kegiatan dan indikator kinerja program/kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan selama 5 (lima) tahun kedepan
4. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam
5. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan dengan Rencana K/L.
6. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Dinas Perikanan Kota Batam baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021-2026, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:



- BAB I** : **PENDAHULUAN**, Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Ranhir Renstra Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021-2026.
- BAB II** : **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN**, Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Batam, Sumberdaya Perikanan Kota Batam baik Sumberdaya Manusia maupun Sumberdaya Alam Perikanan Kota Batam. Gambaran kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Batam dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kota Batam.
- BAB III** : **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN**, Bab ini menggambarkan Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Batam, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026, Telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu – isu strategis.
- BAB IV** : **TUJUAN DAN SASARAN**, Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota



Batam selama Lima Tahun kedepan.

- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,** Bab ini memuat Strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang mewujudkan visi dan misi Walikota serta Wakil Walikota Batam.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,** Bab ini memuat Program dan Kegiatan serta pendanaan Dinas Perikanan untuk lima tahun kedepan
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,** Bab ini menjelaskan Dinas Perikanan sebagai perangkat daerah yang menjalankan bidang urusan Pilihan yang bidang kelautan dan perikanan.
- BAB VIII : PENUTUP**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

2.1 . Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Batam

Dinas Perikanan Kota Batam merupakan dinas yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Terkait terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmedagri 50 Tahun 2021 Peran Dinas Perikanan sesuai peraturan daerah tersebut, antara lain :

2.1.1. KEPALA DINAS

- (1) Dinas Perikanan Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perikanan daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai fungsi:



- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perikanan tangkap dan budidaya, penguatan daya saing produk perikanan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan penyuluh.
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Perikanan tangkap dan budidaya, penguatan daya saing produk perikanan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan penyuluh.
 - c. pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Perikanan tangkap dan budidaya, penguatan daya saing produk perikanan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan penyuluh.
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.
- (5). Dalam pelaksanaan tugas pokok, Dinas Perikanan Kota Batam terdiri dari:
- a. Sekretariat.
 - b. Bidang Perikanan Tangkap.
 - c. Bidang Perikanan Budidaya.
 - d. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2. SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan



mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Dinas.
 - b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas.
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset.
 - d. pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan.
 - e. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.1.3. BIDANG PERIKANAN TANGKAP

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.



- (2) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Perikanan Tangkap.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup Perikanan Tangkap.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Perikanan Tangkap.
 - c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Perikanan Tangkap, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perikanan Tangkap.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Penangkapan Ikan
 - b. Seksi Kenelayanan dan Diversifikasi Usaha Penangkapan
 - c. Seksi Data, informasi dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan

2.1.4. BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Perikanan Budidaya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:



- a. penyusunan rencana dan program lingkup Perikanan Budidaya.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Perikanan Budidaya.
 - c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Perikanan Budidaya, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perikanan Budidaya.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari:
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.
 - b. Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - c. Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya.

2.1.5. BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN

- (1) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.



- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan terdiri dari:
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Produk Perikanan.
 - b. Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan.
 - c. Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan.

2.1.6. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PENYULUH

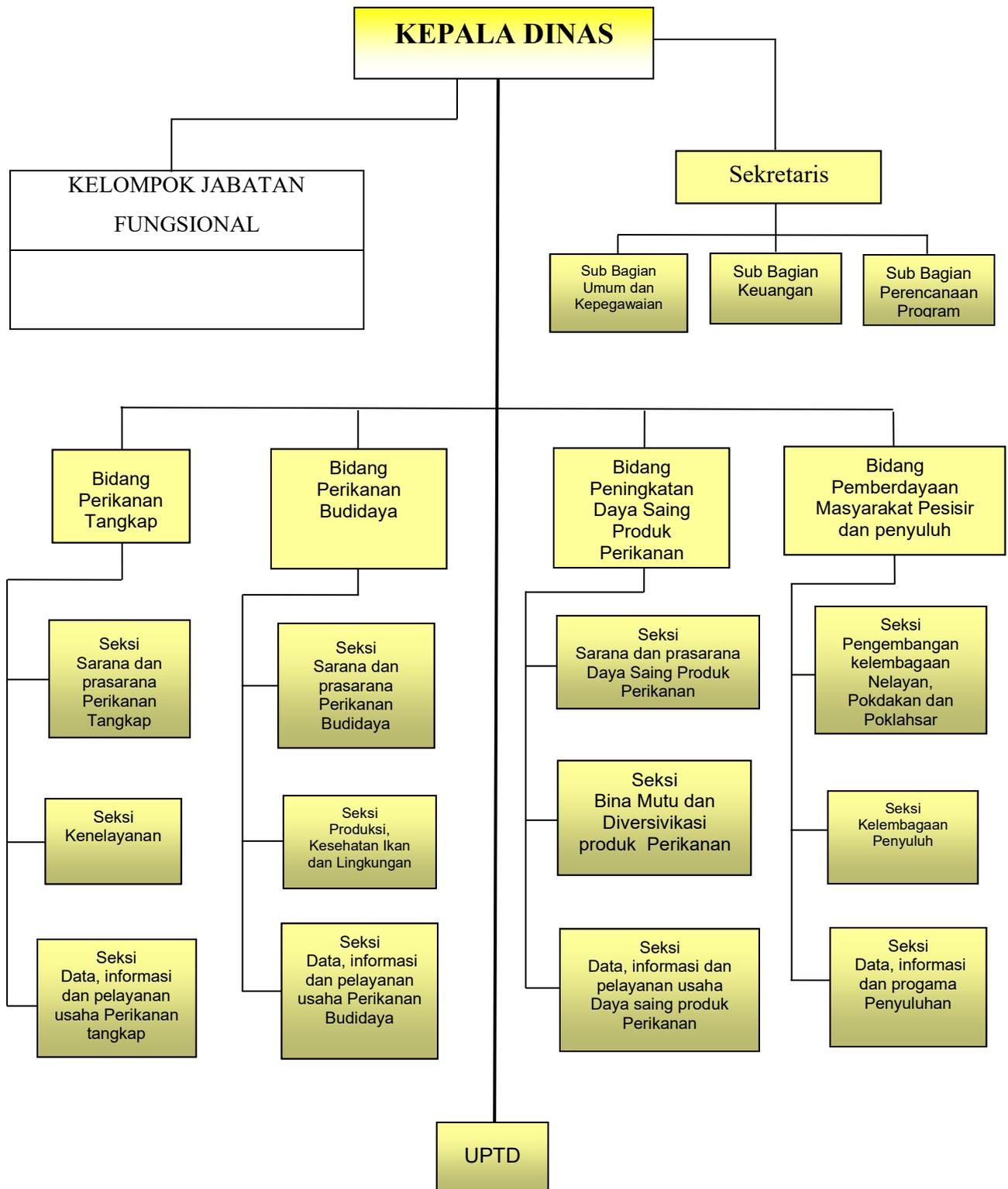
- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah



- lingkup Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh, dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh terdiri dari:
- a. Seksi Penguatan sumber Daya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan pengolahan Hasil Perikanan
 - b. Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh
 - c. Seksi Data, Informasi dan Programa Penyuluh



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Batam
Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Batam

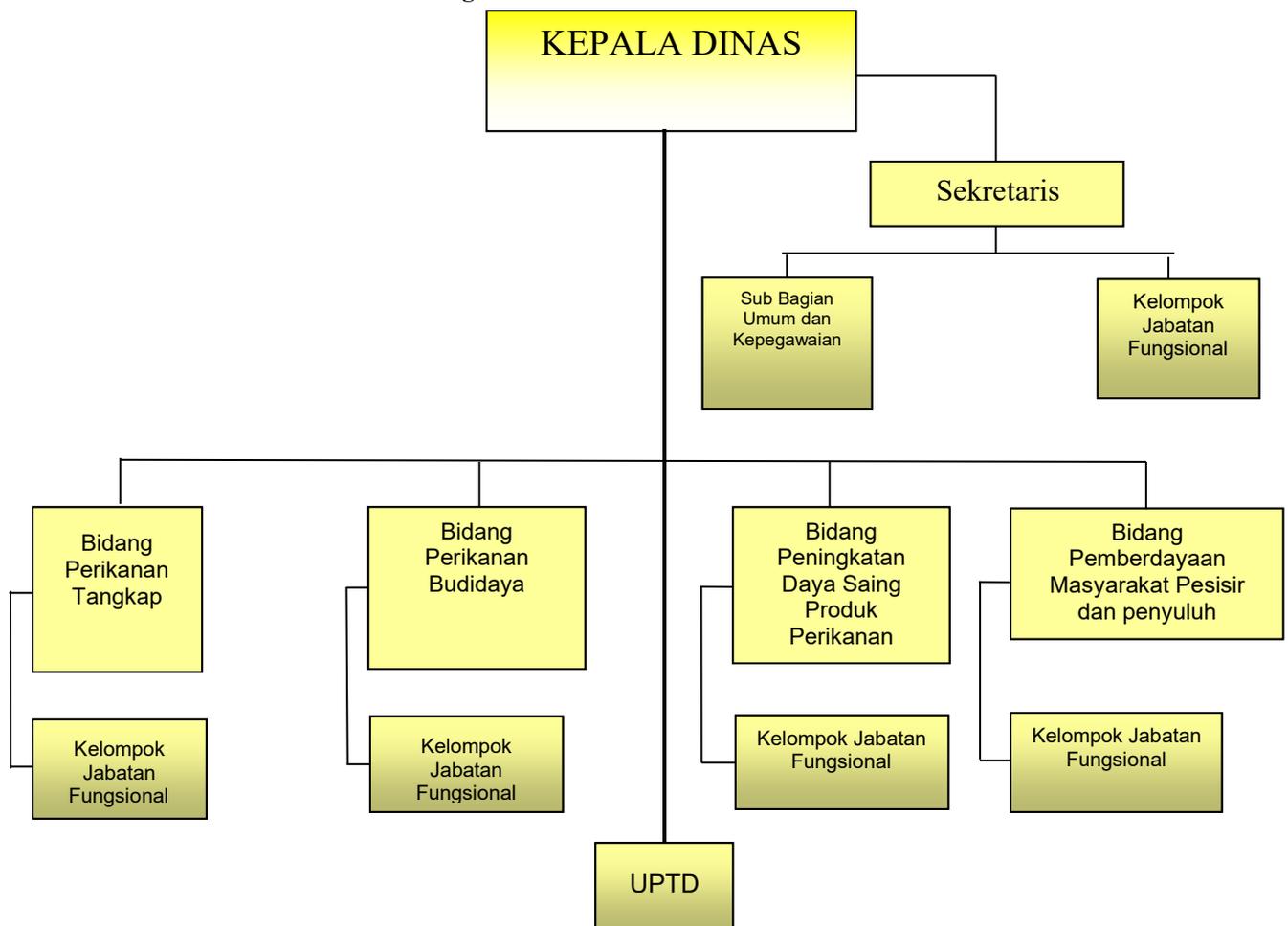




2.1.7 Struktur Organisasi Dinas Perikanan terkait Penyederhaan Birokrasi.

Pada akhir Tahun 2021 akan diberlakukan struktur Dinas Perikanan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan peraturan baru tersebut jabatan structural eselon IV ditiadakan kecuali jabatan structural eselon Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan jabatan eselon IV di UPTD. Dengan pemberlakuan struktur baru yang lebih ramping tersebut diharapkan pelayanan Dinas Perikanan akan lebih efisien.

Gambar 2.2. Rancangan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Batam Mengacu PERMENPAN-RB No. 25 Tahun 2021.





2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan

Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan sektor perikanan pada masa yang akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas. Kondisi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perikanan Kota Batam saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Klasifikasi Pegawai Menurut Usia Per Unit Kerja Tahun 2021

NO	Unit Kerja	Usia (Tahun)	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	59	1
2	Sekretariat	55-58	2
		50-54	1
		45-49	3
		40-44	4
		35-39	1
3	Bidang Perikanan Tangkap	50-55	2
		45-49	2
		40-44	3
4	Bidang Perikanan Budidaya	50-54	1
		45-49	2
		40-44	2
5	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	55-58	1
		45-49	2
		40-44	2
		30-34	1
		25-29	2
6	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh	55-58	2
		50-54	2
		45-49	3
		40-44	3
7	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Bidang Perikanan	50-54	1
		45-49	1
		35-39	1



Tabel 2.2. Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan Per Unit Kerja Tahun 2021

NO	Unit Kerja	Pangkat/ Golongan	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	IV/c	1
2	Sekretariat	IV/b	1
		III/d	1
		III/c	4
		III/b	4
		III/a	1
		II /d	2
		II /c	1
3	Bidang Perikanan Tangkap	III/d	6
		II /d	1
4	Bidang Perikanan Budidaya	III/d	3
		III/b	1
		II /c	1
5	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	IV/b	1
		III/d	3
		III/a	3
		II /c	1
6	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh	IV/a	1
		III/d	5
		III/b	1
		III/a	1
		II /d	1
7	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Bidang Perikanan	II /c	1
		III/c	2
		III/b	1



Tabel 2.3. Klasifikasi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Per Unit Kerja Tahun 2021

NO	Unit Kerja	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	Perempuan	1
2	Sekretariat	Laki-laki	8
		Perempuan	3
3	Bidang Perikanan Tangkap	Laki-laki	6
		Perempuan	1
4	Bidang Perikanan Budidaya	Laki-laki	3
		Perempuan	2
5	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Laki-laki	2
		Perempuan	6
6	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh	Laki-laki	5
		Perempuan	5
7	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Bidang Perikanan	Laki-laki	3
		Perempuan	0

Tabel 2.4. Klasifikasi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Per Unit Kerja Tahun 2021

NO	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	Sarjana	1
2	Sekretariat	Sarjana	8
		SLTA	3
3	Bidang Perikanan Tangkap	Magister	1
		Sarjana	5
		Diploma	1
4	Bidang Perikanan Budidaya	Magister	1
		Sarjana	3
		SLTA	1
5	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Sarjana	7
		SLTA	1
6	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh	Magister	2
		Sarjana	5
		Diploma	1
		SLTA	2
7	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Bidang Perikanan	Sarjana	3



Tabel 2.5. Kondisi Eksisting dan Jumlah Kebutuhan terhadap Jabatan di Lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021

No	Jabatan	Kondisi Eksisting	Jumlah Kebutuhan
1	Kepala Dinas	1	1
2	Sekretaris	1	1
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	1	1
4	Analisis Perencanaan Anggaran	1	1
5	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan	2	2
6	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	1
7	Bendahara	1	1
8	Penata Keuangan	1	1
9	Pengelola Barang Milik Negara	1	1
10	Pengelola Gaji	1	1
11	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1
12	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	0	1
13	Pengadministrasi Umum	1	1
14	Pengelola Kepegawaian	0	1
15	Arsiparis Ahli Pertama	0	1
16	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah	1	1
17	Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah	1	1
18	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	1	1
19	Kepala Seksi Sarana, Prasarana, dan Alat Penangkapan Ikan	1	1
20	Analisis Rancang Bangun dan Alat Penangkap Ikan	0	1



No	Jabatan	Kondisi Eksisting	Jumlah Kebutuhan
21	Pengelola Program dan Kegiatan	0	1
22	Kepala Seksi Kenelayanan dan Diversifikasi Usaha Penangkapan	1	1
23	Analisis Kenelayanan	1	1
24	Analisis Perlindungan dan Pelestarian Ikan	1	1
25	Kepala Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	1	1
26	Analisis Pemulihan Sumberdaya Ikan	0	1
27	Analisis Penyajian Data Sumberdaya Ikan	0	1
28	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	1	1
29	Bidang Perikanan Budidaya	1	1
30	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya	1	1
31	Pengelola Statistik Perikanan	1	1
32	Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya	0	1
33	Teknisi Perikanan Budidaya	0	1
34	Kepala Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1	1
35	Analisis Kesehatan Ikan dan Lingkungan	0	1
36	Kepala Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya	1	1
37	Analisis Perikanan Budidaya	1	1
38	Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	1	1



No	Jabatan	Kondisi Eksisting	Jumlah Kebutuhan
39	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Produk Perikanan	1	1
40	Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan	0	2
41	Analisis Tata Kelola Sumberdaya Ikan	1	1
42	Kepala Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan	1	1
43	Analisis Mutu Hasil Perikanan	0	1
44	Pengelola Pelaksanaan Pengujian Mutu Secara Laboratoris terhadap Produk Hasil Perikanan	0	2
45	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	1	1
46	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama	1	1
47	Kepala Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan	1	1
48	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	0	1
49	Pengolah Data	1	2
50	Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar dan Hasil Perikanan	0	1
51	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh	1	1
52	Kepala Seksi Penguatan Sumberdaya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan	1	1
53	Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan	1	1
54	Analisis Perlindungan dan Pelestarian Ikan	1	1



No	Jabatan	Kondisi Eksisting	Jumlah Kebutuhan
55	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	1	1
56	Kepala Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh	1	1
57	Analisis Kelautan dan Perikanan	0	1
58	Pengelola Program dan Kegiatan	0	1
59	Kepala Seksi Data, Informasi dan Program Penyuluh	1	1
60	Analisis Penyajian Data Sumberdaya Ikan	1	1
61	Pengelola Data	1	1
62	Pengelola Statistik Perikanan	1	1
Total		46	66

Dinas Perikanan Kota Batam mempunyai sarana dan prasarana sebagai yang tertera pada tabel berikut dengan sumber dana yang berasal dari APBD dan APBN.

Tabel 2.6. Sarana Dinas Perikanan Kota Batam

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	Gedung kantor	2 unit	√		Belum memenuhi kebutuhan
2	Kendaraan roda empat	4 unit	√		Belum memenuhi kebutuhan
3	Kendaraan roda dua	8 unit	√		Belum memenuhi kebutuhan
4	Lemari arsip	14 Unit	√		Belum memenuhi kebutuhan
5	Filling Cabinet	2 Unit	√		Belum memenuhi kebutuhan
6	Meja kerja	24 Unit	√		Belum memenuhi kebutuhan



No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
7	Kursi kerja	19 Unit	√		Belum memenuhi kebutuhan
8	AC split	13 Unit	√		Belum memenuhi kebutuhan
9	Komputer PC	13 Unit	√		Belum memenuhi kebutuhan
10	Laptop	10 Unit	√		Belum memenuhi kebutuhan
11	Printer	19 unit	√		Belum memenuhi kebutuhan

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Kegiatan utama usaha sektor perikanan di Kota Batam adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha pengolahan hasil perikanan. Ketiga usaha tersebut memberikan kontribusi dalam penyediaan dan keragaman bahan pangan dari protein hewani. Dengan demikian pengembangan usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan di Kota Batam perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam nomor 1 tahun 2021, maka Dinas Perikanan Kota Batam yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah berfungsi mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Perikanan melalui:

- a. Pembinaan umum dibidang perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- b. Pembinaan teknis dibidang teknologi perikanan dalam batas kewenangan Kota;
- c. Penyelenggaraan pemberian ijin rekomendasi dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya dalam batas kewenangan Kota;
- d. Penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan usaha perikanan;

Dalam penyelenggaraan urusan perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir, Dinas Perikanan Kota Batam mengacu pada sasaran strategis seperti yang ditentukan dalam Renstra sebelumnya. Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis Dinas Perikanan Kota Batam yang meliputi:

1. Meningkatnya produksi perikanan.
2. Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan.
3. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Dinas.

Selain berdasarkan Sasaran Strategis, sejak Tahun 2019 kinerja pelayanan Dinas Perikanan juga mengacu pada indikator kinerja utama:

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
2. Jumlah produksi perikanan
3. Konsumsi ikan perkapita pertahun
4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian indikator kinerja pelayanan dan realisasi anggaran Dinas Perikanan Kota Batam 5 (lima) tahun terakhir dapat dijabarkan pada tabel-tabel berikut:



Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM/IKK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Meningkatnya produksi perikanan (ton)		35,345.00	36,700.00	37,500.00	38.000	39.000	38,906.74	39,903.99	40,935.35	42,901.05	45,629.23	110.08	108.73	109.16	101.75	105.07
2	Meningkatnya Produksi Olahan (ton)		-	1,005.28	1,035.44	1,066.50	1,098.50	-	1,201.60	1,055.5	1,467.86	1,290.40	-	119.53	101.94	137.63	117.47
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		-	75	80.00	85.00	90.00	-	75	82.00	90.00	95.00	-	100	106.25	105.88	105.56
4	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN)		-	-	-	106.00	107.00	-	-	-	106.30	106.73	-	-	-	100.28	99.75
5	Meningkatnya konsumsi ikan perkapita per tahun (kg/kapita/tahun)		-	-	-	36.82	37.74	-	-	-	37.06	41.18	-	-	-	100.65	109.11



Dinas Perikanan Kota Batam berdiri pada akhir Desember 2016. Secara defacto, pelayanan mulai dilaksanakan pada awal Tahun 2017. Oleh sebab itu, secara umum target dan realisasi indicator pada tahun 2016 belum terdapat data kecuali Jumlah Produksi Perikanan (ton) yang sudah ditetapkan sebagai indicator sejak Dinas Perikanan masih bergabung dengan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan (KPPK).

Untuk indicator Meningkatnya produksi perikanan (ton) sejak 2016 sampai dengan 2020 capaian kinerja selalu melebihi target. Produksi perikanan merupakan penjumlahan dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja, seperti Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap baik yang bersumber dari dana DAK maupun APBD dengan output penyediaan sarana perikanan tangkap telah berjalan dengan lancar sehingga mendukung peningkatan produksi perikanan khususnya perikanan tangkap. Begitu juga dengan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kapasitas nelayan dan kelembagaan nelayan telah berjalan dengan lancar dan menghasilkan output yang mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap. Untuk produksi perikanan budidaya, kegiatan dengan output penyediaan sarana usaha perikanan budidaya, pengembangan kapasitas pembudidaya ikan dan lembaga pembudidaya ikan, dan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan juga berjalan dengan lancar sehingga mendukung meningkatnya produksi perikanan budidaya.

Untuk indicator Meningkatnya Produksi Olahan (ton) sejak Tahun 2017 sampai dengan 2020 capaian kinerja selalu melebihi target. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja, seperti kegiatan dengan output penyediaan sarana pengolahan hasil perikanan dan pembinaan mutu olahan hasil perikanan telah berjalan dengan baik sehingga mendukung peningkatan produksim olahan hasil perikanan.



Untuk indikator Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sejak Tahun 2017 sampai dengan 2020 capaian kinerja selalu melebihi target. Kegiatan dengan output penerbitan rekomendasi bagi kelancaran usaha perikanan skala mikro dan kecil dan output penyediaan data dan informasi telah berjalan dengan baik sehingga berdasarkan survey yang telah dilakukan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perikanan melebihi target.

Untuk Indikator Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN), penetapan sebagai indikator dimulai sejak Tahun 2019. Pada Tahun 2019 capaian kinerja dengan indikator Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan melebihi target (100,28%). Sedangkan pada Tahun 2020 capaian kinerja tergolong tinggi yaitu sebesar 99,75%. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja, seperti kegiatan dengan output penyediaan sarana perikanan tangkap, peningkatan kapasitas nelayan, penerbitan rekomendasi bagi kelancaran usaha perikanan skala mikro dan kecil telah berjalan dengan baik sehingga mendukung peningkatan nilai tukar nelayan.

Untuk indikator Meningkatnya konsumsi ikan perkapita per tahun (kg/kapita/tahun), penetapan sebagai indikator dimulai sejak Tahun 2019. Pada Tahun 2019 dan 2020 capaian kinerja dengan indikator melebihi target. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja, seperti kegiatan dengan output penyediaan sarana pengolahan hasil perikanan, pembinaan mutu olahan hasil perikanan, penyelenggaraan acara masak serba ikan dan promosi olahan hasil perikanan telah berjalan dengan baik sehingga mendukung peningkatan jumlah konsumsi ikan penduduk Kota Batam.



Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2016 -2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	-	7,148,510,500	3,601,848,642	3,658,398,088	9,597,220,048	-	6,638,819,459	3,510,366,159	3,524,338,226	8,881,271,065	-	92.87	97.46	96.34	92.54	38.1	35.09
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	2,328,005,200	1,663,667,740	1,939,434,898	1,860,390,748	-	1,985,023,232	1,613,326,093	1,873,307,792	1,757,525,929	-	85.27	96.97	96.59	94.47	(10.82)	(2.93)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	465,315,800	226,621,002	507,361,240	37,290,800	-	434,362,500	226,619,466	472,902,284	36,800,000	-	93.35	100.00	93.21	98.68	(6.69)	(10.46)
Program Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berbasis Konservasi	-	100,730,000	-	-	-	-	93,450,000	-	-	-	-	92.77	-	-	-	(33.33)	(33.33)
Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Perikanan	-	4,254,459,500	1,711,559,900	1,211,601,950	7,699,538,500	-	4,125,983,727	1,670,420,600	1,178,128,150	7,086,945,136	-	96.98	97.60	97.24	92.04	148.83	137.52



Anggaran dan realisasi pendanaan Belanja Langsung Dinas Perikanan Kota Batam dari Tahun 2017 sampai Tahun 2020 berfluktuasi. Rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 38,10% dan rata-rata pertumbuhan realisasi pendanaan sebesar 35,09%.

Sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pendanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari Tahun 2017 sampai Tahun 2020 sebesar -10,82% dan -2,93%. Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pendanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari Tahun 2017 – 2020 sebesar -6,69% dan -10,46%.

Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pendanaan Program Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berbasis Konservasi sebesar -33% dan -33%. Program tersebut hanya dilaksanakan pada Tahun 2017 setelah itu tidak dilaksanakan karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki wewenang dalam pengelolaan laut.

Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pendanaan Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Perikanan sebesar 143,83% dan 137,52%. Pertumbuhan anggaran secara signifikan terjadi pada Tahun 2020 yang sebesar Rp. 7.699.538.500,-. Lebih besar 148.83% dibanding Tahun 2019 yang sebesar Rp. 1.211.601.949,96. Penambahan anggaran sebesar tersebut berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) untuk pemulihan ekonomi akibat wabah COVID-19.



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan

Rencana strategis disusun dengan berbagai tahapan, salah satu aspek penting dalam penyusunannya adalah identifikasi dan/atau klarifikasi factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang perikanan, termasuk faktor dari luar yang berupa tantangan atau peluang.

Tantangan yang dihadapi Dinas Perikanan Kota Batam adalah:

1. Ketiadaan alokasi lahan budidaya perairan di mainland di dalam Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Batam Tahun 2021-2041. Lahan untuk budidaya ikan air tawar dialokasikan di daerah pulau (hinterland) yang jauh dari lokasi pemukiman para pembudidaya ikan. Sehingga ketersediaan lahan tersebut belum mampu dimanfaatkan oleh para pembudidaya ikan di Batam.
2. Program utama di dalam Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Batam Tahun 2021-2041 yang menjadi tugas Dinas Perikanan Kota Batam berupa pengelolaan wilayah mangrove dan terumbu karang dalam pelaksanaannya terbentur dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Pemasaran hasil tangkapan nelayan bersifat individu, belum terintegrasi dan sistematis.

Di Kota Batam belum terdapat tempat pelelangan ikan (TPI) sebagai sentra penjualan hasil perikanan yang dapat diakses oleh semua nelayan. Perlu dilakukan kajian pembangunan TPI sebagai sentra penjualan hasil perikanan bagi nelayan di Kota Batam.



4. Penurunan kualitas perairan.

Proses cut and fill (pemotongan dan penimbunan) lahan yang terjadi di Pulau Batam dapat menurunkan kualitas air laut yang mempengaruhi produksi perikanan tangkap dan budidaya karena tanah hasil cut and fill akan menuju ke laut saat hujan tiba. Akan terjadi sedimentasi di laut yang dapat menutupi terumbu karang, mangrove dan padang lamun yang menjadi tempat ikan berkembang biak.

Adapun peluang yang harus bisa dimanfaatkan Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Bidang perikanan merupakan salah satu prioritas dalam proses pembangunan Nasional dan Daerah.

Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kepulauan Riau dalam memajukan pembangunan bidang perikanan terus berlanjut dengan mengedepankan arah dan kebijakan pembangunan nasional yang meletakkan bidang perikanan sebagai salah satu prioritas pembangunan melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan yang optimal dan lestari.

2. Berkembangnya inovasi dan teknologi dibidang perikanan.

Dengan adanya inovasi dan teknologi dibidang perikanan terutama perikanan budidaya dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi perikanan yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat perikanan. Inovasi dan teknologi mendorong perbaikan teknik perikanan sehingga pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan menjadi lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.



3. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat

Minat masyarakat akan konsumsi ikan setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini menjadi salah satu peluang pembangunan dibidang perikanan terus berkembang seiring dengan dukungan pemerintah melalui program sosialisasi gemar makan ikan yang sarasannya adalah anak usia dini, sehingga konsumsi ikan dapat terus berkelanjutan.

4. Letak strategis

Terletak pada jalur pelayaran Internasional dan dekat dengan Singapura sehingga memudahkan akses dalam kegiatan pemasaran produk-produk perikanan.

5. Penyederhanaan Birokrasi

Dengan terbitnya PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, birokrasi menjadi lebih dinamis, terwujudnya profesionalitas ASN, focus pada pekerjaan fungsional, percepatan system kerja, pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kota Bata merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang mempunyai tugas dan fungsi pada sektor perikanan. Kebijakan dan strategi di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun hasil pengolahan perikanan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan protein ikan di Kota Batam dan Propinsi Kepulauan Riau pada umumnya. Oleh karena itu, guna mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Batam, maka dipetakan permasalahan sebagai berikut.

Tabel. 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan.	1. Masih rendahnya produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk peningkatan kesejahteraan.	1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan yang modern.



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		2. Masih rendah nya nilai jual produk nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan.	2. Pemasaran hasil perikanan bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematis. 3. Masih rendahnya penguasaan teknologi oleh nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan. 4. Pencemaran perairan laut sehingga mempengaruhi produksi perikanan tangkap dan budidaya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2021–2026, adalah:

“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”

Visi tersebut mengandung empat pokok visi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Batam pada Tahun 2026, yaitu “Bandar Dunia”, “Madani”, “Modern”, dan “sejahtera”. Pokok visi “Bandar Dunia”, “Madani”, dan “Sejahtera” menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai pada Tahun 2026.



Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan.

Terkait dengan misi penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026, Dinas Perikanan diberi amanat untuk mendukung pencapaian misi pertama RPJMD Kota Batam yaitu: “Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.”

Dalam Misi Pertama ini Dinas Perikanan diberi amanat untuk mendukung pencapaian Tujuan ke-2 yaitu **Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif** dengan sasaran yang hendak dituju yaitu **Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya.**

Untuk mewujudkan sasaran RPJMD tersebut, Dinas Perikanan Kota Batam menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya. Oleh sebab itu program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2021-2026 difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan.

Akar permasalahan sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 3.1 menjadi penghambat bagi Dinas Perikanan Kota Batam dalam usaha mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2021-2026 sehingga diperlukan strategi dan arah kebijakan untuk menyelesaikan akar permasalahan tersebut.



Tabel 3.2. Kaitan Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Peran Dinas Perikanan

No	Misi Kepala Daerah	Tujuan	Sasaran	Peran Dinas Perikanan	Program Dinas Perikanan
1	Misi ke-1 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan Perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.	1.2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif	1.2.3. Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya	Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Perikanan Tangkap. 2. Pengelolaan Perikanan Budidaya. 3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.



3.3. Telaahan Renstra K/L dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Perencanaan strategis tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten/kota saja melainkan harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan propinsi maupun pemerintah pusat.

3.3.1 Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Di dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menetapkan visi dan misi tetapi menjabarkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI. Dimana Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu :

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong."

dijabarkan KKP menjadi:

"Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong."

Empat Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;



dijabarkan menjadi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dari penjabaran Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2020-2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan 9 (Sembilan) sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu:

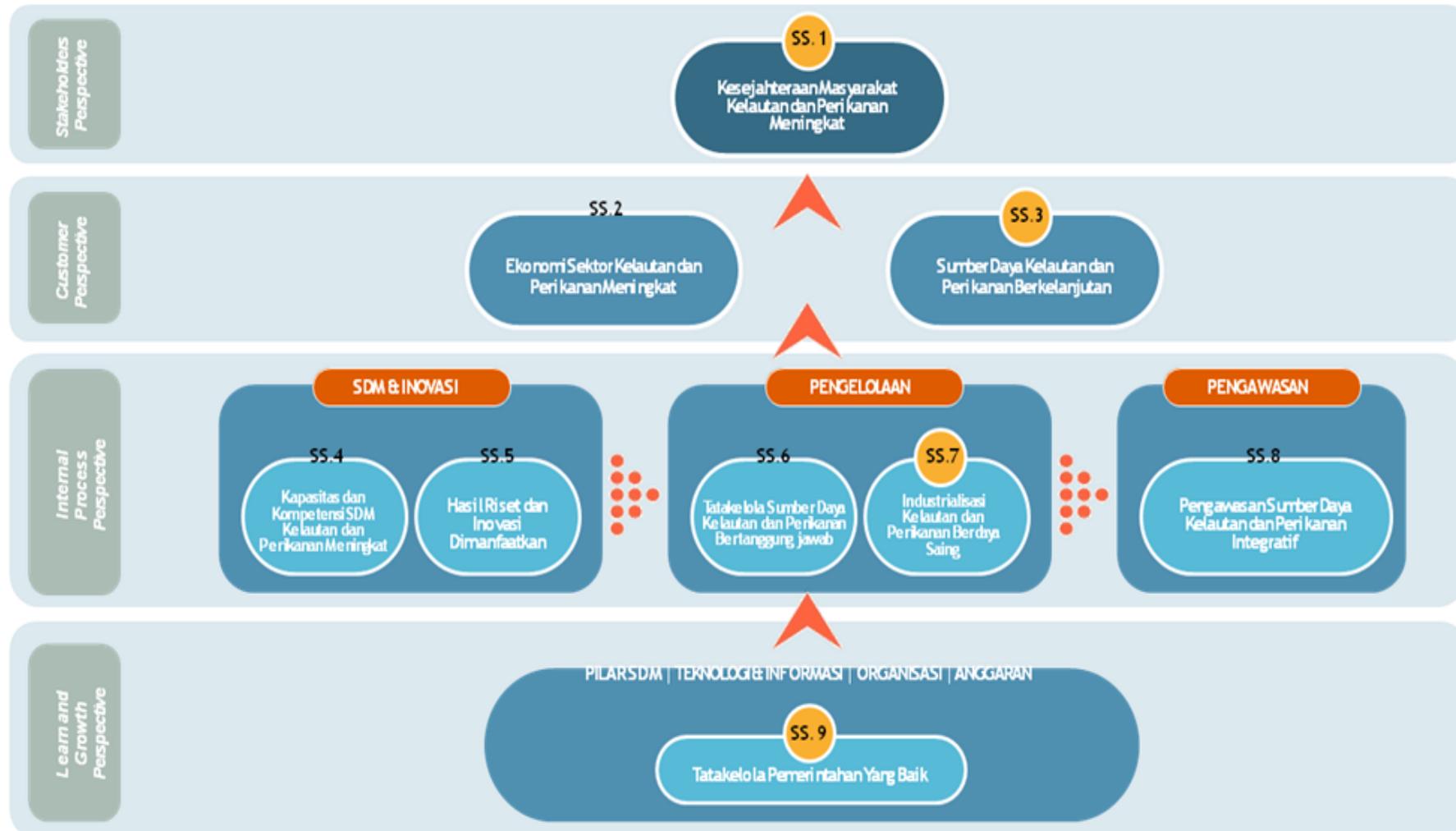
1. Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkatkan.
2. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan.
3. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.
4. Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan Meningkatkan.
5. Hasil Riset dan Inovasi Dimanfaatkan.
6. Tatakelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bertanggung jawab.
7. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing;
8. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Integratif.
9. Tata kelola Pemerintahan Yang Baik.



Sasaran yang hendak dicapai KKP Periode 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Gbr. 3.1 Peta Strategi KKP Tahun 2020 - 2024
PETA STRATEGI KKP TAHUN 2020 - 2024





Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sektor Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, penerimaan negara dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat.
2. Mengoptimalkan produksi perikanan tangkap sesuai potensi lestari untuk meningkatkan penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, dan penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait;
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan Perikanan.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama sasaran strategis pertama yaitu Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan sama dengan



sasaran yang hendak dicapai Dinas Perikanan Kota Batam yaitu meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan. Persamaan sasaran strategis tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang akan dilakukan KKP akan saling mendukung dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kota Batam.

Begitu juga dengan 5 (lima) arah kebijakan sektor Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan KKP, terutama arah kebijakan nomor 1 sampai 3, yang mengoptimalkan produksi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan selaras dengan rencana Dinas Perikanan Kota Batam yang hendak meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan melalui peningkatan produksi. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan KKP dapat disinkronkan dengan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam sehingga saling mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.



Tabel 3.3 Keselarasan Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan KKP dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Batam

No	Sasaran Strategis/Arah Kebijakan KKP	Tujuan/Sasaran Dinas Perikanan	Peluang	Tantangan	
I	Sasaran Strategis KKP	Tujuan Dinas Perikanan			
	1	Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat	Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan	Saling mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan	
	2	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan	Saling mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan	
	3	Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan Meningkat	Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan	Saling mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan	
	4	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan	Saling mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan	
II	Arah kebijakan KKP	Sasaran Dinas Perikanan			
	1	Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, penerimaan negara dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein he-wan untuk konsumsi masyarakat	Meningkatnya produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan	Saling mendukung keberhasilan pencapaian arah kebijakan dan sasaran	



No	Sasaran Strategis/Arah Kebijakan KKP	Tujuan/Sasaran Dinas Perikanan	Peluang	Tantangan
II	Arah kebijakan KKP	Sasaran Dinas Perikanan		
2	Mengoptimalkan produksi perikanan tangkap sesuai potensi lestari untuk meningkatkan penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, dan penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan	Meningkatnya produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan	Saling mendukung keberhasilan pencapaian arah kebijakan dan sasaran	
3	Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan	Meningkatnya produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan	Saling mendukung keberhasilan pencapaian arah kebijakan dan sasaran	



3.3.2 Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Sebagaimana yang tertera dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, tujuan yang ditetapkan adalah untuk menjabarkan misi ke-1 Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yaitu: “Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat,” yaitu:

1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap untuk peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan (productivity)
2. Peningkatan produksi dan kualitas produk hasil olahan kelautan dan perikanan (competitiveness)
3. Terjaganya Kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan (sustainability)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan sasaran yang ingin dicapai diantaranya adalah:

1. Meningkatnya produksi perikanan dan pendapatan nelayan.
2. Meningkatnya Produksi olahan hasil kelautan dan perikanan.
3. Meningkatnya kualitas produk olahan hasil kelautan dan perikanan.

Kesamaan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dengan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan



Kota Batam berpengaruh positif bagi Dinas Perikanan
Kota Batam dalam upaya mencapai sasaran.



Tabel 3.4 Keselarasan Tujuan dan Sasaran DKP Provinsi Kepulauan Riau dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Batam

No	Tujuan/Sasaran Strategis DKP Kepri	Tujuan/Sasaran Dinas Perikanan	Peluang	Tantangan	
I	Tujuan DKP Kepri	Tujuan Dinas Perikanan			
	1	Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap untuk peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan (productivity)	Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan	Saling mendukung keberhasilan pencapaian tujuan OPD	
	2	Peningkatan produksi dan kualitas produk hasil olahan kelautan dan perikanan (competitiveness)		Saling mendukung keberhasilan pencapaian tujuan OPD	
II	Sasaran DKP Kepri	Sasaran Dinas Perikanan			
	1	Meningkatnya produksi perikanan dan pendapatan nelayan	Meningkatnya produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan	Saling mendukung keberhasilan pencapaian sasaran OPD	
	2	Meningkatnya Produksi olahan hasil kelautan dan perikanan		Saling mendukung keberhasilan pencapaian sasaran OPD	
	3	Meningkatnya kualitas produk olahan hasil kelautan dan perikanan		Saling mendukung keberhasilan pencapaian sasaran OPD	



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Pola Ruang Wilayah

Di dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Batam Tahun 2021-2041 telah ditetapkan kawasan peruntukan lindung dan peruntukan budidaya yang memberikan pengaruh terhadap pelayanan Dinas Perikanan Kota Batam. Selain itu juga terdapat program utama dimana Dinas Perikanan Kota Batam diamanatkan sebagai Perangkat Daerah pelaksana. Terdapat peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Perikanan Kota Batam dalam penetapan kawasan dan rencana pelaksanaan program tersebut. Berikut table tentang peluang dan tantangan penetapan kawasan dan program utama yang menjadi tanggungjawab Dinas Perikanan.



Tabel 3.5 Kawasan Peruntukan RTRW Kota Batam 2021-2041 terkait Dinas Perikanan

No	Kawasan Peruntukan	Lokasi	Peluang	Tantangan
1	Penetapan Kawasan Ekosistem Mangrove sebagai salah satu Kawasan Peruntukan Lindung dengan luas lahan 404 hektar	Kec. Galang, Batuaji, Bulang, Belakangpadang dan Nongsa	Ekosistem mangrove berfungsi sebagai wilayah pembesaran anak ikan	Lahan seluas 404 hektar belum dapat mendukung secara signifikan terhadap fungsi mangrove wilayah pembesaran ikan.
2	Kawasan Hutan Lindung seluas 19.395 hektar	Kec. Batam Kota, Batu Aji, Beng-kong, Bulang, Ga-lang, Lubukbaja, Nongsa, Sagulung, Seibeduk, Sekupang	Hutan lindung dapat mengurangi efek pencemaran lingkungan yang umumnya bermuara ke laut	-
3	Kawasan Hutan Buru seluas 2.642 hektar	Kec. Galang	Hutan buru dapat mengurangi efek pencemaran lingkungan yang umumnya bermuara ke laut	-



No	Kawasan Peruntukan	Lokasi	Peluang	Tantangan
4	Kawasan hutan produksi terbatas seluas 9.101 ha	Kec. Galang, Bulang, Belakngpadang, Seibeduk, Batuaji dan Nongsa	Hutan produksi terbatas dapat mengurangi efek pencemaran lingkungan yang umumnya bermuara ke laut	-
5	Kawasan hutan produksi tetap seluas 2.361 hektar	Kec. Belakngpadang, Sekupang, Nongsa, Seibeduk, Bulang, Galang,	Hutan produksi tetap dapat mengurangi efek pencemaran lingkungan yang umumnya bermuara ke laut	-
6	Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 11.514 hektar	Kec. Galang, Bulang, Belakngpadang, Seibeduk, Batuaji, Sekupang, Nongsa	Hutan produksi yang dapat dikonversi dapat mengurangi efek pencemaran lingkungan yang umumnya bermuara ke laut	-
7	Kawasan perkebunan seluas 1.622 ha	Kecamatan Bulang, Galang, Batuaji, Nongsa dan Belakngpadang.	Dapat digunakan sebagai lahan budidaya perikanan	Lokasi yang dapat digunakan sebagai lahan budidaya perairan terletak di Kecamatan Bulang dan Galang yang letaknya jauh dari pemukiman pembudidaya ikan sehingga belum dapat dimanfaatkan pembudidaya ikan yang umumnya tinggal di mainland.



No	Kawasan Peruntukan	Lokasi	Peluang	Tantangan
8	Kawasan peternakan seluas 6.009 ha	Kecamatan Bulang	Dapat digunakan sebagai lahan budidaya perikanan	Lokasi jauh dari pemukiman pembudidaya ikan sehingga belum dapat dimanfaatkan pembudidaya ikan yang umumnya tinggal di mainland



Tabel 3.6 Program Utama RTRW Kota Batam 2021-2041 terkait Dinas Perikanan

No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Peluang	Tantangan
1	Penanaman mangrove pada kawasan rawan abrasi	Kec. Belakang Padang, Bulang, Galang	Dinas Perikanan/ Swasta		Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 penanganan mangrove bukan wewenang Dinas Perikanan Kab/ Kota.
2	Pelaksanaan kegiatan Coremap	Kec. Galang	Dinas Perikanan		Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 penanganan terumbu karang, mangrove dan padang lamun bukan wewenang Dinas Perikanan Kab/ Kota.
3	Rehabilitasi kawasan terumbu karang	Kec. Belakang Padang, Galang	Dinas Perikanan		Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 penanganan terumbu karang bukan wewenang Dinas Perikanan Kab/ Kota.
4	Pengawasan dan monitoring kawasan terumbu karang	Kec. Belakang Padang, Galang	Dinas Perikanan		Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 penanganan terumbu karang bukan wewenang Dinas Perikanan Kab/ Kota.



3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan daerah perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup di wilayahnya untuk menjamin kelayakan hidup bagi warga masyarakat. Daya dukung lingkungan perlu diperhatikan untuk menghasilkan lingkungan yang asri dan layak huni bagi segenap warga Kota Batam.

Pembangunan lingkungan hidup ini juga berkaitan dengan peningkatan ketahanan bencana dan terutama bencana iklim yang diakibatkan oleh perubahan iklim akibat dari peningkatan gas rumah kaca secara global. Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) menunjukkan lebih dari 30.000 kejadian bencana selama periode 2011-2020, sekitar 97 persen diantaranya adalah bencana hidrometeorologi atau bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, gelombang laut ekstrem dan kenaikan permukaan laut, sementara itu hanya sekitar 3 persen yang berasal dari bencana geologi. Dalam konteks ini Kota Batam memang dapat dikatakan tidak memiliki potensi bencana geologi, namun Kota Batam sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi, terutama kekeringan yang diikuti kelangkaan air bersih, potensi curah hujan tinggi yang diikuti dengan banjir, dan peningkatan gelombang ekstrem yang berdampak pada aktifitas pelayaran terutama bagi kapal 10-30GT. Kondisi ini berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan di Kota Batam terutama nelayan kecil yang sarana penangkapan ikannya masih sederhana. Hingga Tahun



2020 sebanyak 88 persen armada tangkap nelayan di Kota Batam berupa kapal dengan ukuran di bawah 5 GT. Oleh sebab itu kondisi ini harusantisipasi salah satu caranya dengan bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kota Batam agar sebelum melaut nelayan Kota Batam mendapatkan informasi tentang cuaca sehingga dapat dilakukanantisipasi.

3.5. Penentuan isu-Isu Strategis Dinas Perikanan Kota Batam

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah



Kementerian Kelautan dan Perikanan, sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, implikasi RTRW dan KSLH Kota Batam ditetapkan isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Batam sebagaimana table berikut.



Tabel. 3.4 Penetapan Isu-isu Strategis Dinas Perikanan

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Peningkatan pendapatan nelayan	Pemasaran hasil tangkapan nelayan bersifat individu, belum terintegrasi dan sistematis.	Pemasaran hasil perikanan yang terintegrasi dan sistematis
2	Peningkatan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan.	Sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan belum mampu mendukung peningkatan produksi secara optimal	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan
		Lahan yang tersedia untuk perikanan budidaya masih terbatas dan teralokasi di tempat yang jauh dari pembudidaya ikan.	
		Tingkat penguasaan teknologi nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan masih rendah	



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Dinas dan Perikanan Kota Batam dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Batam. Berdasarkan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Batam terkait dengan pencapaian misi pertama dari RPJMD Kota Batam yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.

Tujuan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang ditindaklanjuti Dinas Perikanan Kota Batam adalah Tujuan ke-2 yaitu: Meningkatkan Perekonomian Batam yang Merata dan Inklusif dengan indikator Indeks Gini. Sedangkan sasaran Tahun 2021-2026 Perikanan Kota Batam adalah Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan dengan indikator nilai tukar nelayan (NTN). Dinas Perikanan Kota Batam mendukung sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan pembudidaya ikan dengan indikator sasaran nilai tukar nelayan (NTN).

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan



kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Tujuan Dinas Perikanan Kota Batam adalah **“Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil melalui peningkatan produksi”**.

Adapun sasaran yang hendak diraih Dinas Perikanan Kota Batam adalah:

“Meningkatnya produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan”, dengan indikator sasaran:

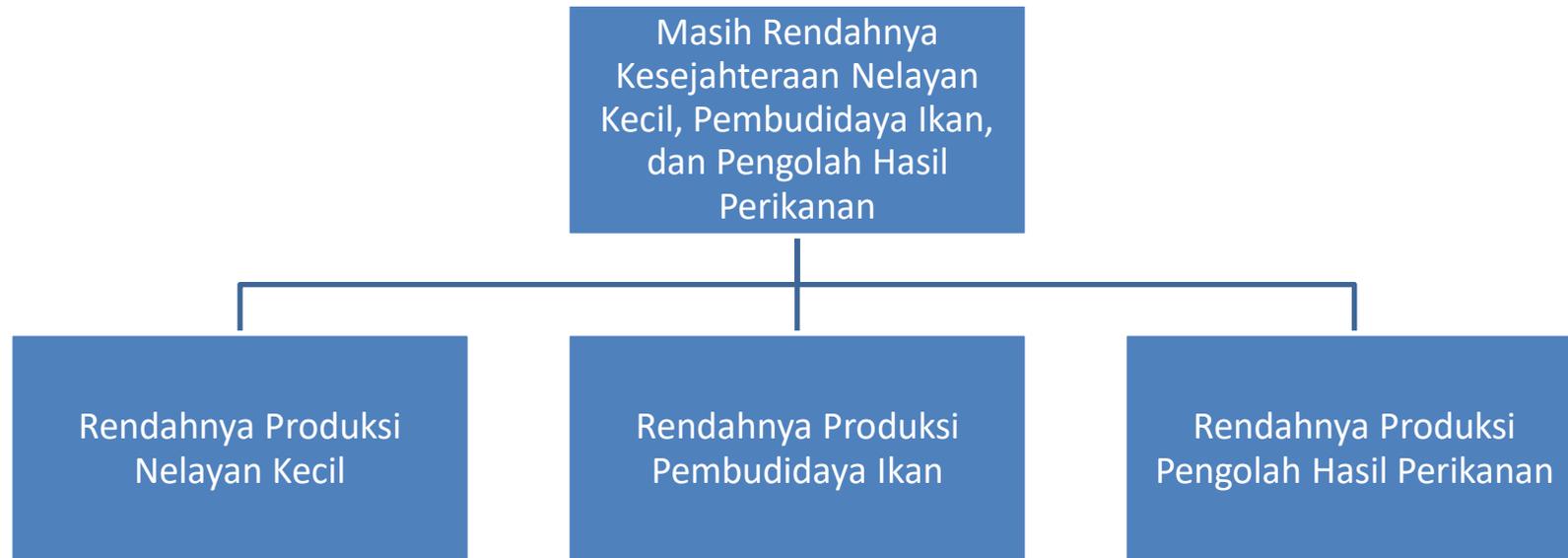
1. Persentase peningkatan produksi nelayan kecil.
2. Persentase peningkatan produksi pembudidaya ikan.
3. Persentase peningkatan produksi pengolah hasil perikanan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kota Batam beserta indikator dan target dapat dilihat pada Table 4.1.

Sedangkan penentuan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kota Batam sebagaimana tersebut di atas didahului dengan analisa pohon masalah, analisa pohon tujuan dan analisa ukuran keberhasilan sebagaimana terlihat pada gambar 4.1, gambar 4.2 dan gambar 4.3 berikut.

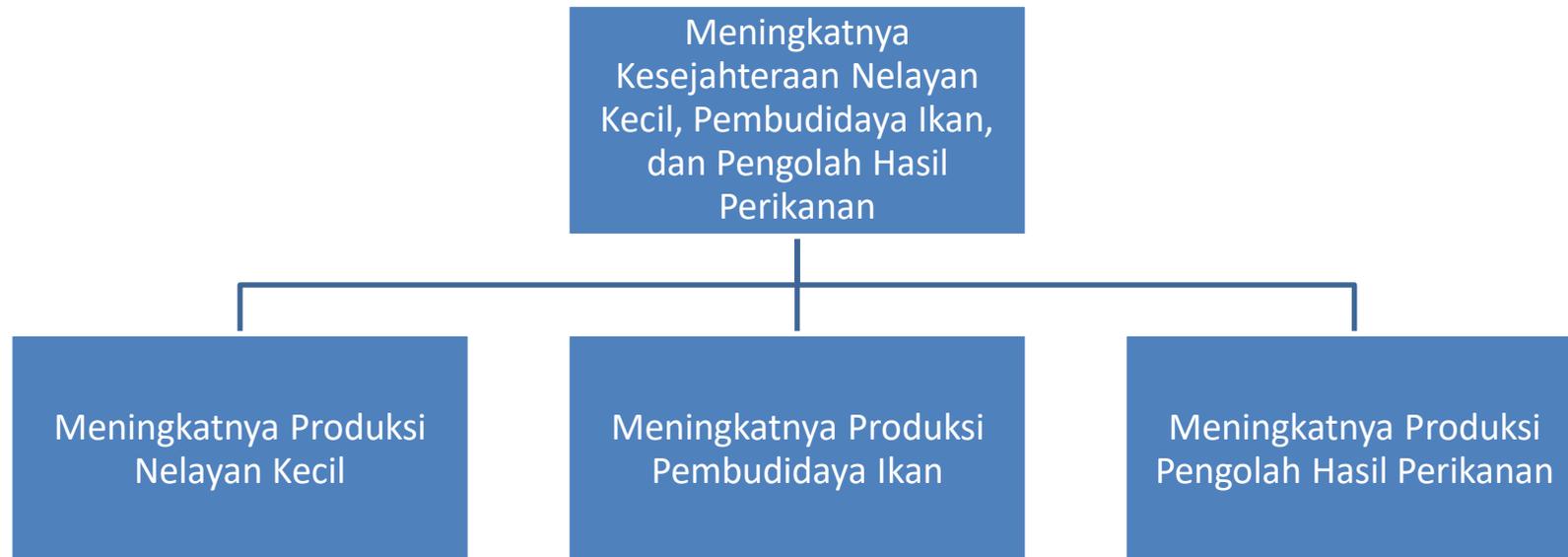


Gambar 4.1 Analisa Pohon Masalah



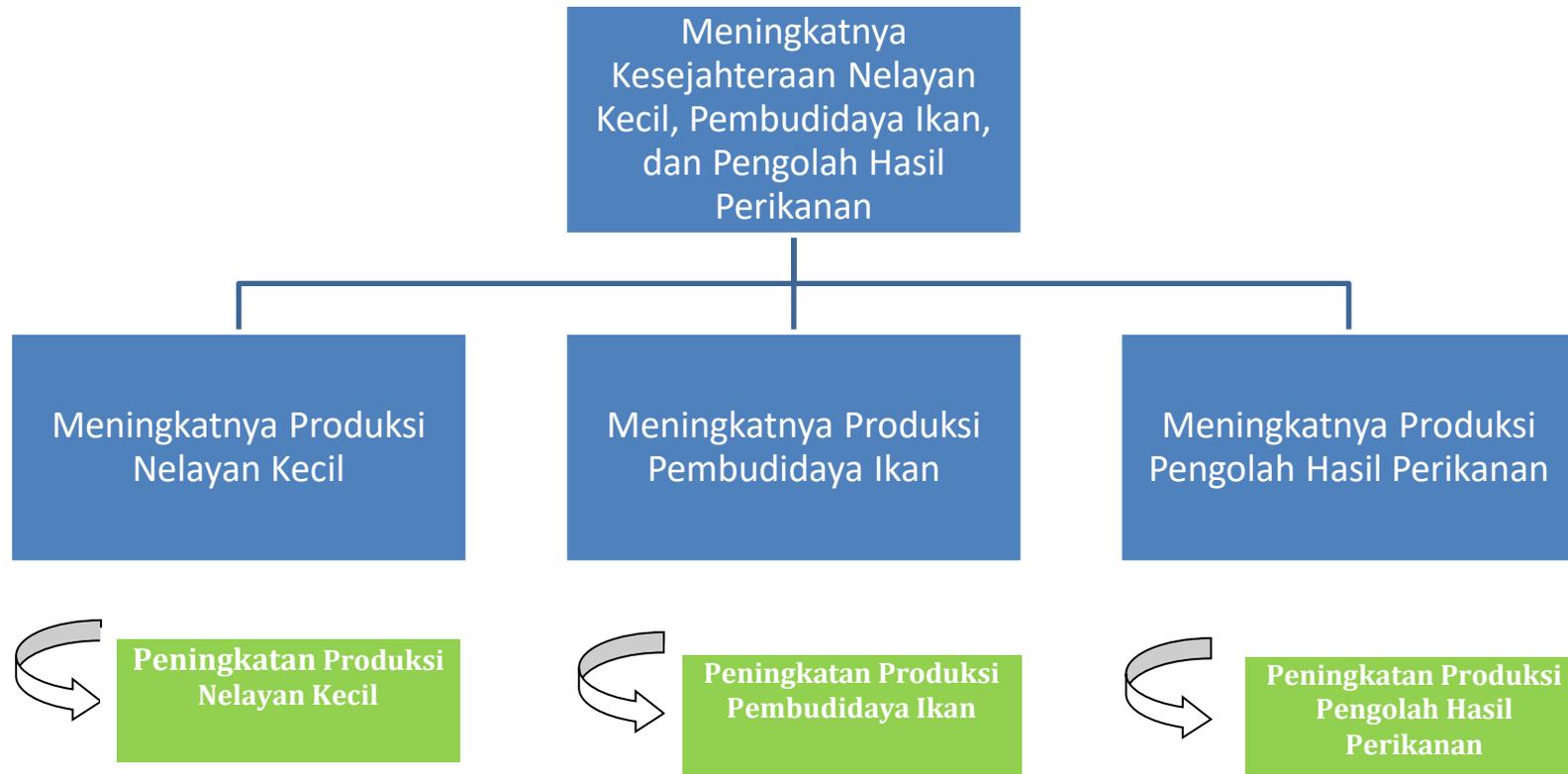


Gambar 4.2 Analisa Pohon Tujuan





Gambar 4.3 Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)





Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan	Nilai Tukar Nelayan			100.50	101.00	101.50	102.00	102.50	103.00
		Meningkatnya produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan	Persentase peningkatan produksi nelayan kecil	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			Persentase peningkatan produksi pembudidaya ikan	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			Persentase peningkatan produksi pengolah hasil perikanan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara-cara yang ditempuh dengan memilih program-program prioritas sesuai visi misi Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Batam yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja capaian dalam 5 tahun. Strategi Dinas Perikanan dalam hal ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merelaisasikan misi ke 1 dari Pemerintah Kota Batam dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Pemerintah Kota Batam disusun secara komprehensif agar dapat mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan hal tersebut arah kebijakan dibuat untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, melalui arah



kebijakan dan strategi dapat dijelaskan secara sistematis dan tetap menjadi rujukan dalam setiap jalannya kegiatan pemerintahan selama 5 tahun. Perumusan strategi didasarkan pada kriteria: 1) Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 3) Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat (analisis SWOT).

Analisis SWOT, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Perikanan Kota Batam disajikan pada gambar dan table dibawah ini:



Gambar 5.1 Diagram Analisis SWOT Perumusan Strategi Jangka Menengah

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Kepulauan Riau. 2. Berkembangnya inovasi dan teknologi di bidang perikanan. 3. Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Kota Batam. 4. Letak Kota Batam yang strategis. 	<p>Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya ruang untuk perikanan budidaya yang diakomodir dalam RTRW Kota Batam 2021-2041. 2. Program pengelolaan wilayah pesisir yang tertera di dalam RTRW 2021-2041 dalam pelaksanaannya terbentur dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Penurunan kualitas perairan. 4. Pemasaran hasil perikanan yang individual dan belum sistematis.
<p>Kekuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOTK yang jelas dan penyederhaan birokrasi. (Tabel 2.2) 	<p>Alternatif Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan Pengelolaan Perikanan Tangkap. 2. Mengoptimalkan Pengelolaan Perikanan Budidaya. 3. Mengoptimalkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 	
<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM dari segi kualitas dan kuantitas. (Tabel 2.4) 2. Belum memadainya sarana pendukung. (Tabel 2.5) 		



Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perikanan Kota Batam

VISI : Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera					
MISI ke-1 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Kegiatan Perekonomian Berbasis Keunikan dan Keunggulan Wilayah					
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan	1.1 Meningkatkan produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan	1.1.1 Mengoptimalkan Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.1.1.1	Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap
				1.1.1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perikanan dan Penyediaan Data/Informasi Perikanan Tangkap
				1.1.1.3	Pengembangan Kapasitas dan kelembagaan Nelayan Kecil
				1.1.1.4	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha bagi nelayan kecil
				1.1.1.5	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
			1.1.2 Mengoptimalkan Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.1.2.1	Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya
			1.1.2.2	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan	1.1 Meningkatkan produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan	1.1.2 Mengoptimalkan Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.1.2.3 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan
				1.1.2.4 Pengembangan Kapasitas dan kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil
				1.1.2.5 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
				1.1.2.6 Penyediaan Data/Informasi Perikanan Budidaya
			1.1.3 Mengoptimalkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.1.3.1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan
				1.1.3.2 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha olahan hasil Perikanan Skala Mikro
				1.1.3.3 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
				1.1.3.4 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan



**Tabel 5.2 Keterkaitan Strategi RPJMD 2021-2026
dengan Strategi Renstra Dinas Perikanan 2021-2026**

No	Strategi RPJMD Kota Batam 2021-2026	Strategi Renstra Dinas Perikanan 2021-2026
1	Meningkatkan produktivitas nelayan kecil dan budidaya	Mengoptimalkan pengelolaan perikanan tangkap
		Mengoptimalkan pengelolaan perikanan budidaya
		Mengoptimalkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

**Tabel 5.3 Keterkaitan Program Dinas Perikanan dengan
Program Prioritas Janji Walikota dan Wakil Walikota**

No	Program Prioritas Janji Kepala Daerah	Kegiatan Unggulan RPJMD	Program Dinas Perikanan
1	Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Meningkatkan pendapatan nelayan dan petani melalui pasar yang menjual produk lokal	Pengelolaan perikanan tangkap



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021-2026 dalam rangka mensukseskan Visi dan Misi ke - 1 RPJMD Kota Batam merupakan program dan kegiatan baru mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana program dan kegiatan disajikan Tabel 6.1 di bawah ini.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2021-2026
Kota Batam

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2020 (Kondisi awal)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22		23		
1 Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan	Meningkatnya produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan	Nilai Tukar Nelayan				100,30	100,50	3.588.370.550	101,00	2.749.856.705	101,50	3.944.451.776	102,00	17.349.054.259	102,50	3.215.483.161	103,00	3.338.636.166	103,00	34.185.852.614	Dinas Perikanan	Batam		
						1,01	1,00	3.329.589.300	1,00	1.678.263.090	1,00	2.785.995.340	1,00	16.097.576.774	1,00	1.917.826.157	1,00	1.991.278.899	6,15	27.800.529.560	Dinas Perikanan	Batam		
						I. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi nelayan kecil (ton)	19.954,32	20.153,86	3.329.589.300	20.355	1.678.263.090	20.559	2.785.995.340	20.765	16.097.576.774	20.972	1.917.826.157	21.182	1.991.278.899	21.182	27.800.529.560	Bidang Perikanan Tangkap	Batam
						1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pemenuhan sarana perikanan tangkap yang disediakan (jumlah sarana yang disediakan tahun n / total sarana yang disediakan sd tahun n+5)	100%	22,03%	960.269.000	15,59%	1.528.591.220	15,59%	1.581.174.758	15,59%	1.637.464.579	15,59%	1.597.887.022	15,59%	1.662.916.095	100%	8.968.302.675	Bidang Perikanan Tangkap	Batam
						2 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya	2,49%	2,84%	2.369.320.300	3,20%	149.671.870	3,55%	204.820.582	3,91%	212.112.195	4,26%	219.939.135	4,62%	228.362.804	4,62%	3.384.226.886		Batam
						3 Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang dikelola (unit)	0	0	0	0	0	1 unit	1.000.000.000	1 unit	14.248.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	15.448.000.000	Bidang Perikanan Tangkap	Batam
								2,12%	2%	258.781.250	2%	594.127.135	2%	614.565.108	2%	688.223.626	2%	713.619.078	2%	740.950.689	12,61%	3.610.266.885	Dinas Perikanan	Batam
								II. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi pembudidaya ikan (ton)	7.234,87	7.379,57	258.781.250	7.527	594.127.135	7.678	614.565.108	7.831	688.223.626	7.988	713.619.078	8.148	740.950.689	8.148	3.610.266.885



Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2020 (Kondisi awal)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
				1 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah RTP yang memenuhi standar sesuai SOP	220 RTP	242 RTP	258.781.250	264 RTP	498.541.600	286 RTP	515.691.431	308 RTP	534.050.046	330 RTP	553.756.493	352 RTP	574.965.366	352 RTP	2.935.786.186	Bidang Perikanan Budidaya	Batam
				2. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang meningkat status kelasnya	0	-	-	0,35%	95.585.535	0,70%	98.873.677,40	1,05%	154.173.580	1,40%	159.862.585	1,75%	165.985.322	1,75%	724.480.701	Bidang Perikanan Budidaya	Batam
		Persentase peningkatan produksi pengolah hasil perikanan				-12,08%	0,00%	-	1,00%	477.466.480	1,00%	543.891.327	1,00%	563.253.858	1,00%	584.037.926	1,00%	606.406.578	6,15%	2.775.056.169	Dinas Perikanan	Batam
				III PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolah hasil perikanan (ton)	1.290,49	-	1.316,43	477.466.480	1.329,59	543.891.327	1.342,89	563.253.858	1.356,32	584.037.926	1.369,88	606.406.578	1.369,88	2.775.056.169	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Batam	
				1 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Mikro dan Kecil Yang terdaftar	5,00	0	-	0,00	-	10 UPI	50.000.000	10 UPI	51.780.000	10 UPI	53.690.682	10 UPI	55.747.035	40 UPI	211.217.717	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Batam
				2 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan ikan konsumsi (ton)	51.274 ton	-	52.304,61	397.466.210	52.827,65	411.139.048	53.355,93	425.775.598	53.889,49	441.486.717	54.428,38	458.395.659	54.428,38	2.134.263.231	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Batam	
				3 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Cakupan UPI yang dibina (Juml. UPI yang dibina / jumlah UPI yang terdaftar x 100%)	50%	0,00%	-	20,00%	80.000.270	20,00%	82.752.279	20,00%	85.698.260	20,00%	88.860.526	20,00%	92.263.884	100%	429.575.220	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Batam
				IV PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penun-jang urusan pemerintah daerah	100%	100%	9.650.511.936	100%	11.369.586.796	100%	11.369.586.796	100%	11.369.586.796	100%	12.575.110.019	100%	13.056.736.733	100%	69.391.119.076	Sekretariat	Batam
				1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	7.581.809.616	100%	9.336.138.598	100%	9.286.138.598	100%	9.286.138.598	100%	10.162.896.329	100%	10.552.135.259	100%	56.205.256.998	Sekretariat	Batam
				2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	0%	0%	-	0%	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	67.650.259	100%	70.241.264	100%	237.891.524	Sekretariat	Batam

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2020 (Kondisi awal)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	348.971.000	100%	195.503.678	100%	195.503.678	100%	195.503.678	100%	217.156.263	100%	225.473.348	100%	1.378.111.646	Sekretariat	Batam
				4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	1.582.120.520	100%	1.541.739.520	100%	1.541.739.520	100%	1.541.739.520	100%	1.712.491.534	100%	1.778.079.959	100%	9.697.910.573	Sekretariat	Batam
				5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	0%	100%	53.460.000	100%	130.905.000	100%	130.905.000	100%	130.905.000	100%	145.403.099	100%	150.972.038	100%	742.550.137	Sekretariat	Batam
				6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi		100%	84.150.800	100%	165.300.000	100%	165.300.000	100%	165.300.000	100%	269.512.534	100%	279.834.864	100%	1.129.398.198	Sekretariat	Batam
Jumlah Dana								13.238.882.486		14.119.443.501		15.314.038.572		28.718.641.055		15.790.593.180		16.395.372.899		103.576.971.689		



BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja pelayanan bidang urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Perikanan Kota Batam dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam periode masa jabatan Tahun 2021-2026. Penetapan indikator mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kota Batam yang telah ditetapkan:



Tabel. 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perikanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Tukar Nelayan	100.30	100.50	101.00	101.50	102.00	102.50	103.00	103.00
1.1.	Persentase peningkatan produksi nelayan kecil	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.15%
1.1.1.	Jumlah produksi nelayan kecil (ton)	19,954.32	20,153.86	20,355	20,559	20,765	20,972	21,182	21,182
1.2.	Persentase peningkatan produksi pembudidaya ikan	2.12%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	12.61%
1.2.1.	Jumlah produksi pembudidaya ikan (ton)	7,234.87	7,379.57	7,527	7,678	7,831	7,988	8,148	8,148
1.3.	Persentase peningkatan produksi pengolah hasil perikanan	-12.08%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	6.15%
1.3.1.	Jumlah produksi pengolah hasil perikanan (ton)	1,290.49	0	1,316.43	1,329.59	1,342.89	1,356.32	1,369.88	1,369.88



Berdasarkan table diatas maka Dinas Perikanan Kota Batam mendukung tercapainya sasaran RPJMD Kota Batam Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan Kecil dan Budidaya dengan indicator Nilai Tukar Nelayan (NTN) diharapkan mencapai 103 pada kondisi akhir periode RPJMD.



BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen yang sah setelah ditetapkan oleh Walikota Batam.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021-2026 akan berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Perikanan Kota Batam dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan. Pelaksanaan rencana strategis ini sangat memerlukan partisipasi dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021-2026 dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten guna mendukung terwujudnya good governance.



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

Jl. Raja Haji No. 5 Telp. (0778) 321 760 Fax. (0778)

Email : dinasperikananbatambatam@yahoo.com

SEKUPANG - BATAM

Kode Pos : 29428

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA BATAM

Nomor : KTPS. 018/DP-BTM/SET/02/2021

TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERIKANAN KOTA BATAM TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Urusan Perikanan Kota Batam sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Batam tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk menyusun Renstra Dinas Perikanan Kota Batam Tahun Anggaran 2021-2026, perlu dibentuk Tim Penyusun Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 76/HK/II/2021 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan keputusan Kepala Dinas Perikanan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Nomor .. Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor ...);
18. Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pokok Dinas Perikanan Kota Batam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021-2026 yang mana Susunan Keanggotaan Tim Penyusun (Renstra) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021-2026 terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Dinas Perikanan

Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Renstra Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021-2026 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dengan penuh tanggungjawab dalam menyiapkan dokumen Renstra Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Batam, 19 Februari 2021

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KOTA BATAM**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 018 /DP-BTM/SET/02/2021
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2021
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN KOTA BATAM TAHUN
2021-2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KOTA BATAM TAHUN 2021-2026**

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
I.	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PERIKANAN TANGKAP	
1.	Kabid Perikanan Tangap	Koordinator
2.	Kasi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	Anggota
3.	Kasi Kenelayanan, dan Diverifikasi Usaha Penangkapan	Anggota
4.	Kasi Sarana, Prasarana, dan Alat Penangkapan Ikan	Anggota
II.	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	
1.	Kabid Perikanan Budidaya	Koordinator
2.	Kasi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya	Anggota
3.	Kasi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
4.	Kasi Sarana dan Prasarana Budidaya	Anggota

III.	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	
1.	Kabid Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Koordinator
2.	Kasi Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan	Anggota
3.	Kasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan	Anggota
4.	Kasi Bina Mutu Deversifikasi Produk Perikanan	Anggota
IV.	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PENYULUH	
1.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh	Koordinator
2.	Kasi Data, Informasi dan Program Penyuluh	Anggota
3.	Kasi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh	Anggota
4.	Kasi Penguatan Sumberdaya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan	Anggota
V	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN BIDANG PERIKANAN	
1	Kepala Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Pelayanan Bidang Perikanan	Koordinator

Batam, 19 Februari 2021

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KOTA BATAM**



Ir. HUSNAINI

NIP.19620819 199203 2 005